

Comparative Effectiveness of Merah Putih Cooperatives in Rural and Urban Areas of Ponorogo

Chelsea Meilia Az Zahra^{1*}, Lila Levi Mumpuni²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

*E-Mail: 25112065073@mhs.unesa.ac.id, 25112064022@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Merah Putih Village/Subdistrict Cooperative Program is a national strategic policy aimed at strengthening the community economy through cooperative institutions. This program is supported by a strong legal foundation, including Presidential Instruction Number 9 of 2025 and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Ponorogo Regency is one of the regions with a high implementation rate, marked by the establishment of 307 cooperatives covering all villages and subdistricts. This study aims to analyze the effectiveness of Merah Putih Cooperatives in community economic empowerment through a comparative approach between rural and urban areas. The research uses a descriptive qualitative method supported by secondary data analysis and descriptive statistics. The results show that administratively the program has been effective with 100% coverage, but operationally it remains less than optimal due to the low number of active cooperatives. Urban areas demonstrate better organizational performance, while rural areas possess greater economic potential but face institutional and accessibility constraints.

Keyword: Cooperative Effectiveness, Merah Putih Cooperative, Community Empowerment, Rural Development, Urban Development, Ponorogo Regency.

Article Info:

Received 21 Mei 2026

Received in revised 6 Juni 2026

Accepted 25 Mei 2026

Available online 15 Agustus 2026

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1231>



Abstrak

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan koperasi. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah dengan tingkat implementasi tinggi yang ditandai dengan terbentuknya 307 koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan komparatif



[Indonesian Journal of Community Empowerment \(IJCE\)](https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1231) is published under licensed of a CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1231>

antara wilayah desa dan kota. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif program telah efektif dengan cakupan 100%, namun secara operasional masih belum optimal karena rendahnya jumlah koperasi aktif. Wilayah kota memiliki kinerja organisasi yang lebih baik, sedangkan wilayah desa memiliki potensi ekonomi yang besar tetapi terkendala kapasitas kelembagaan dan aksesibilitas.

Kata Kunci: Efektivitas, Koperasi Merah Putih, Pemberdayaan Ekonomi, Desa Dan Kota, Ponorogo.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, koperasi memiliki posisi penting sebagai instrumen ekonomi kerakyatan [1], yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif [2]. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, secara yuridis keberadaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu kebijakan terbaru adalah pembentukan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [3], [4] yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang sebagai strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui pembentukan koperasi di seluruh wilayah administratif Indonesia. Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor usaha seperti perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, pengelolaan hasil pertanian, hingga pengembangan usaha mikro masyarakat.

Secara konseptual, program Koperasi Merah Putih merupakan bentuk implementasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas (community-based economic development) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal [5]. Model pembangunan ini diyakini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah [6]. Namun demikian, efektivitas implementasi program tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembentukan kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, efektivitas organisasi menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Efektivitas organisasi dapat diukur [7], [8] melalui kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, menjaga integrasi internal, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan



eksternal. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam melakukan hal yang tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dalam perspektif organisasi modern, efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian output administratif, tetapi juga dari outcome dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal [2], [7].

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah dengan tingkat implementasi Program Koperasi Merah Putih yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2025, sebanyak 307 Koperasi Merah Putih telah terbentuk [3], [9] dan mencakup seluruh desa serta kelurahan di wilayah tersebut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi administratif program telah mencapai 100 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Ponorogo karena dinilai responsif dalam mempercepat pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan.

Meskipun demikian, keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan operasional di lapangan. Berdasarkan data Portal JTV Madiun tahun 2025, dari total 307 koperasi yang telah terbentuk, hanya sebagian kecil koperasi yang telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif [10], [11]. Rendahnya tingkat operasional koperasi menunjukkan adanya kesenjangan antara pembentukan kelembagaan dan implementasi substantif program. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembentukan organisasi secara formal belum tentu mencerminkan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo masih lebih berorientasi pada pencapaian target administratif dibandingkan efektivitas fungsional organisasi koperasi. Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan formal organisasi, tetapi juga kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan [5], [6]. Dengan demikian, pembentukan koperasi secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan program apabila aktivitas ekonomi koperasi belum berjalan secara optimal. Selain itu, sebagian besar koperasi masih berada dalam tahap pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan.

Di sisi lain, karakteristik wilayah desa dan kota di Kabupaten Ponorogo juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Wilayah perdesaan di Ponorogo umumnya memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan usaha mikro rumah tangga [2], [8]. Namun, wilayah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, akses teknologi yang terbatas, serta minimnya akses terhadap pasar dan permodalan [2] [12] [8]. Sebaliknya, wilayah perkotaan memiliki keunggulan dalam akses infrastruktur, jaringan distribusi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih baik. Akan tetapi, wilayah perkotaan juga dihadapkan pada tingkat persaingan ekonomi yang lebih tinggi dan kecenderungan individualisme yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi anggota koperasi.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Koperasi Merah Putih tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam (one size fits all) sering kali menghadapi kendala ketika diterapkan pada wilayah dengan karakteristik berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis



yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan kinerja organisasi koperasi di wilayah desa dan kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program. Perbedaan karakteristik wilayah desa dan kota menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing wilayah. Wilayah perkotaan cenderung lebih siap dalam pengelolaan koperasi karena didukung akses teknologi, pendidikan, dan jaringan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah pedesaan masih menghadapi kendala pada aspek manajerial dan infrastruktur meskipun memiliki potensi ekonomi lokal yang besar [2], [7], [7].

Penelitian mengenai efektivitas Koperasi Merah Putih menjadi penting dilakukan karena hingga saat ini kajian empiris terkait implementasi program tersebut, khususnya dalam konteks perbandingan wilayah desa dan kota, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas koperasi dari aspek kelembagaan dan ekonomi secara umum, sedangkan kajian mengenai efektivitas organisasi dan perbedaan karakteristik wilayah masih belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi administrasi publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian terdahulu umumnya membahas koperasi dari perspektif kelembagaan, manajemen usaha, dan kontribusi ekonomi secara umum. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan efektivitas implementasi Koperasi Merah Putih antara wilayah desa dan kota masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum menyoroti hubungan antara karakteristik wilayah dengan efektivitas organisasi koperasi dalam konteks kebijakan nasional terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis komparatif efektivitas organisasi koperasi berbasis wilayah dalam implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis efektivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta membandingkan kinerja organisasi koperasi di wilayah desa dan kota di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan, dinamika organisasi koperasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam konteks Program Koperasi Merah Putih.

Metode studi literatur digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, berita resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif teoritis dan empiris. Selain itu, metode studi literatur dinilai relevan karena Program Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan yang masih relatif baru sehingga sebagian besar data tersedia dalam bentuk dokumen pemerintah dan publikasi media resmi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, publikasi Badan Pusat Statistik, laporan implementasi Program Koperasi Merah Putih, artikel berita media lokal dan nasional, serta jurnal ilmiah



yang membahas koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan efektivitas organisasi. Data utama penelitian meliputi pembentukan 307 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo, tingkat operasional koperasi, progres pembangunan infrastruktur koperasi, serta bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi program.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan validitas sumber. Peneliti melakukan identifikasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo, kemudian menyeleksi data berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan antar sumber untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan input, output, dan outcome. Aspek input meliputi kebijakan pemerintah, dukungan pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur koperasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan koperasi. Aspek output dianalisis berdasarkan jumlah koperasi yang terbentuk, legalitas koperasi, pembangunan gedung koperasi, dan aktivitas usaha yang telah dijalankan. Sementara itu, aspek outcome dianalisis berdasarkan dampak keberadaan koperasi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, peningkatan kesejahteraan anggota, serta keberlanjutan kelembagaan koperasi. Penelitian ini juga membandingkan outcome antara wilayah desa dan kota untuk mengetahui pengaruh karakteristik wilayah terhadap efektivitas implementasi program.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers dan konsep efektivitas manajemen dari Peter Drucker. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan koperasi dalam mencapai tujuan organisasi, menjalankan fungsi ekonomi, serta beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan kinerja Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari dokumen pemerintah, jurnal, dan laporan media diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian mengenai efektivitas implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.

2. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan perbandingan antara wilayah desa dan kota untuk mempermudah proses analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala pelaksanaan koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2025, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo telah membentuk Koperasi Merah Putih dengan total sebanyak 307 koperasi. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Ponorogo sebagai salah

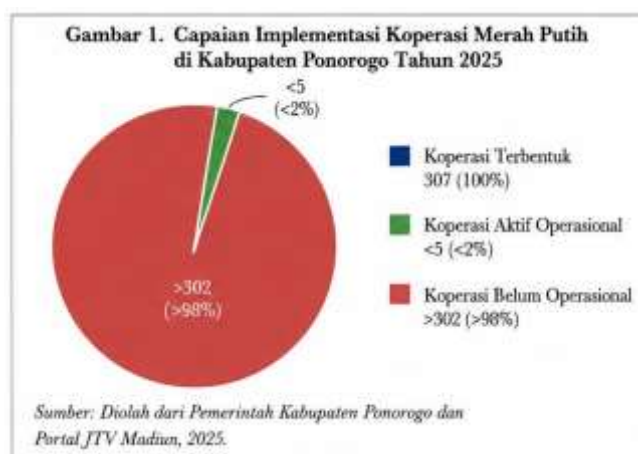


satu daerah dengan percepatan implementasi program tercepat di Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pembentukan koperasi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan secara nasional yang kemudian diperkuat oleh pembentukan satuan tugas percepatan di tingkat pusat hingga daerah.

Tabel 1. Capaian Implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Indikator	Jumlah	Presentase
Total Desa/Kelurahan	307	100%
Koperasi Terbentuk	307	100%
Koperasi Aktif Operasional	<5	<2%
Koperasi Belum Operasional	>302	>98%

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Portal JTV Madiun, 2025.



Gambar 1. Capaian Implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Portal JTV Madiun, 2025

Meskipun pembentukan koperasi telah mencapai 100 persen, keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan substantif dalam aspek operasional usaha. Data menunjukkan bahwa dari total 307 koperasi yang telah memperoleh legalitas badan hukum, hanya sebagian kecil yang telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif. Sebagian besar koperasi masih berada pada tahap persiapan operasional, pembangunan sarana, dan penyusunan tata kelola organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian output administratif dengan outcome ekonomi yang diharapkan masyarakat.

Dalam perspektif teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa organisasi telah berhasil mencapai tujuan formal berupa pembentukan kelembagaan, tetapi belum menunjukkan efektivitas penuh dalam menjalankan fungsi operasional secara berkelanjutan. Dengan kata lain, efektivitas struktural telah



tercapai, namun efektivitas fungsional organisasi masih menghadapi berbagai kendala implementasi.

Pada aspek input, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mendukung implementasi program. Hal ini tercermin melalui percepatan pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus), pembentukan struktur organisasi koperasi, penyusunan regulasi pendukung, serta dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat juga menyiapkan skema pembiayaan pengembangan koperasi, termasuk pembangunan gudang, gerai koperasi, serta dukungan fasilitas logistik desa.

Namun demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, minimnya pengalaman manajerial pengurus, keterbatasan akses teknologi dan digitalisasi, belum meratanya infrastruktur koperasi di wilayah desa, serta tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program masih cenderung bersifat top-down, sehingga kapasitas kelembagaan masyarakat belum berkembang secara optimal.

Secara output, program menunjukkan capaian yang relatif tinggi karena seluruh koperasi telah memiliki legalitas dan struktur organisasi formal. Selain itu, pembangunan fasilitas fisik koperasi mulai dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo.



Gambar 2. Tahapan Implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Portal JTV Madiun, 2025.

Meskipun demikian, aktivitas usaha koperasi masih sangat terbatas sehingga kontribusi terhadap perekonomian masyarakat belum terlihat secara signifikan. Dalam perspektif Peter Drucker, efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan mencapai target formal, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan tujuan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi secara administratif belum dapat dinilai berhasil sepenuhnya apabila belum mampu menghasilkan aktivitas ekonomi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik implementasi antara wilayah desa dan wilayah perkotaan di Kabupaten Ponorogo.



Tabel 1. Perbandingan Implementasi Koperasi Merah Putih di Wilayah Desa dan Kota Kabupaten Ponorogo

Indikator	Wilayah Desa	Wilayah Kota
Jumlah koperasi	Tinggi	Tinggi
Aktivitas usaha	Masih terbatas	Lebih aktif
SDM pengelola	Relatif rendah	Relatif lebih baik
Akses pasar	Terbatas	Lebih luas
Infrastruktur	Belum merata	Lebih memadai
Potensi ekonomi local	Sangat besar	Sedang
Dukungan teknologi	Rendah	Lebih tinggi

Sumber: Diolah peneliti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo serta berbagai literatur terkait, 2026.

Wilayah desa memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena didukung oleh sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro berbasis rumah tangga. Selain itu, budaya gotong royong masyarakat desa menjadi modal sosial yang mendukung pengembangan koperasi berbasis komunitas. Akan tetapi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, akses pasar, dan infrastruktur menjadi faktor penghambat perkembangan koperasi desa.

Pembahasan

Implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [3], [4] di Kabupaten Ponorogo menunjukkan capaian administratif yang sangat tinggi. Dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dampak Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo masih berada pada tahap awal. Hal tersebut disebabkan sebagian besar koperasi belum menjalankan aktivitas usaha secara aktif. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya dampak positif awal berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi kolektif, tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya kelembagaan ekonomi lokal, terbukanya peluang pengembangan usaha mikro berbasis koperasi, serta meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi desa [13]. Di beberapa wilayah, pembangunan gudang dan gerai koperasi juga mulai diarahkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan produk lokal masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo lebih berhasil pada aspek kuantitatif dibandingkan kualitas kelembagaan. Pemerintah daerah mampu memenuhi target pembentukan koperasi secara cepat, tetapi belum sepenuhnya berhasil memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan orientasi kebijakan pada pencapaian target administratif (administrative compliance) dibanding penguatan kapasitas kelembagaan jangka panjang [14]. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, profesionalisme pengurus koperasi, pendampingan usaha, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga formal, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nyata.

Sebaliknya, wilayah perkotaan menunjukkan kapasitas organisasi yang relatif lebih baik karena didukung tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, akses teknologi yang lebih memadai, serta jaringan ekonomi yang lebih luas. Meskipun demikian, tingkat partisipasi sosial masyarakat perkotaan cenderung lebih rendah akibat berkembangnya pola ekonomi yang lebih individualistik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan koperasi



tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam (*one size fits all*), melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonomi masing-masing wilayah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal melalui pembentukan dan pengembangan koperasi yang mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas usaha, serta penguatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo telah berjalan di berbagai wilayah dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Dari sisi kuantitas, jumlah koperasi yang terbentuk di wilayah desa maupun kota tergolong cukup tinggi. Namun, secara kualitas pelaksanaan masih ditemukan ketimpangan dalam efektivitas pengelolaan koperasi. Wilayah perkotaan cenderung memiliki implementasi yang lebih baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang lebih memadai, akses teknologi yang lebih tinggi, jaringan pemasaran yang lebih luas, serta kondisi infrastruktur yang lebih mendukung aktivitas ekonomi koperasi.

Sementara itu, wilayah pedesaan memiliki potensi ekonomi lokal yang sangat besar, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dikembangkan secara optimal akibat berbagai kendala yang masih dihadapi. Kendala tersebut meliputi rendahnya kemampuan manajerial pengurus koperasi, minimnya pelatihan dan pendampingan, keterbatasan akses pasar, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurang meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian koperasi masih belum berjalan secara maksimal dan hanya aktif secara administratif tanpa aktivitas usaha yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi Program Koperasi Merah Putih sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Koperasi yang memperoleh pembinaan rutin, pelatihan manajemen, serta dukungan pengembangan usaha cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan koperasi yang minim pendampingan. Oleh karena itu, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi, tetapi juga pada proses penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa Program Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Ponorogo apabila didukung dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan pengelolaan yang optimal, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pengurus koperasi, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.



V. REFERENSI

- [1] M. R. Bhowmik, “Advancing the Theory of Cooperative Organization: Interrogating the Developing Country Perspectives,” *J. Entrep. Organ. Divers.*, vol. 9, no. 1, pp. 45–61, 2020, doi: 10.5947/jeod.2020.003.
- [2] A. R. Saputri, Subandriyo, and M. I. Hardiyan, “Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan,” *J. Soc. Bridg.*, vol. 3, no. 2, pp. 95–106, 2025, doi: 10.59012/jsb.v3i2.83.
- [3] “307 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Ponorogo, Kurang dari Lima Sudah Beroperasi.” .
- [4] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, “Setneg RI,” *Setneg RI*. 2025.
- [5] S. Masiun and F. Elvi, “Penguatan kapasitas masyarakat melalui penerapan model koperasi berkelanjutan,” *J. Pembelajaran Pemberdaya. Masy.*, vol. 6, no. 4, pp. 1061–1073, 2025, doi: 10.33474/jp2m.v6i4.24096.
- [6] D. D. Batujai, K. P. Barat, and K. L. Tengah, “Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Volume 6 Nomor 1 / Januari 2025 Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Batujai Beriuk Meres Lombok Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang,” vol. 6, pp. 72–100, 2025.
- [7] Rudy Rahwana, “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Cibinong Bogor,” *J. Rimba Ris. Ilmu Manaj. Bisnis dan Akuntansi*, vol. 1, no. 4, pp. 415–428, 2023, doi: 10.61132/rimba.v1i4.575.
- [8] K. D. Yuangga, D. Sunarsi, and G. D. Pratama, “Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Din. J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 42–49, 2024, doi: 10.56457/dinamika.v2i1.587.
- [9] Nanang, “Ponorogo Tuntas Bentuk 307 Koperasi Merah Putih, Tercepat Kedua se-Jatim.” .
- [10] “Satgas Kabupaten Kejar Target Bangun Gedung 307 Koperasi Merah Putih di Ponorogo.” .
- [11] A. Samson and M. A. L. Kurni, “103-Article Text-333-1-10-20210814,” vol. 4, no. 1, pp. 105–121, 2021.
- [12] M. Taraf and H. Masyarakat, “Nur Baehaqi Syamsu Universitas Terbuka Mataram, Indonesia,” vol. 3, no. 6, pp. 461–468, 2023.
- [13] A. Dahlena, G. Abdul, F. Maulani, N. A. Hamdani, and A. Solihat, “The Influence of Creative Economy-Based Entrepreneurial Cognitive on Entrepreneurial Success,” vol. 7, no. 4, pp. 249–258, 2025.
- [14] N. A. Hamdani and I. Sari, “Investigating the Relationship between Entrepreneurial Knowledge and Entrepreneurial Interest: A Survey on E-Commerce Entrepreneur,” *Int. J. Business, Econ. Soc. Dev.*, vol. 4, no. 3, pp. 132–138, 2023, doi: 10.46336/ijbesd.v4i3.467.

